



PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA SEBAGAI PILAR PENGUATAN KARAKTER BANGSA

Meliwati¹

¹Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura,
Pontianak, Indonesia
Email: meliwati@gmail.com

Abstract

This study aims to explore the understanding of Indonesian citizens regarding their rights and obligations as pillars for strengthening national character. A descriptive qualitative approach was used, with data collection techniques including in-depth interviews, focus group discussions (FGD), and observations in several locations across Indonesia. The results show that the public has a better understanding of their rights compared to their obligations. Urban communities tend to be more aware of their rights, while rural communities focus more on their obligations. However, both groups still lack understanding of the relationship between rights and obligations, which should complement each other. This study recommends improving the quality of civic education with a more practical and experiential approach, as well as the need for teacher training to deliver more engaging and contextual material. The findings are expected to contribute to the development of more effective civic education policies in Indonesia.

Keywords: rights and obligations, civic education, national character, public understanding, character strengthening.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman masyarakat Indonesia mengenai hak dan kewajiban warga negara sebagai pilar penguatan karakter bangsa. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan observasi di beberapa lokasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka lebih baik dibandingkan dengan pemahaman terhadap kewajiban mereka. Masyarakat perkotaan cenderung lebih sadar akan hak-hak mereka, sementara masyarakat pedesaan lebih fokus pada kewajiban. Namun, kedua kelompok masih kurang memahami keterkaitan antara hak dan kewajiban yang seharusnya saling melengkapi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas pendidikan kewarganegaraan dengan pendekatan yang lebih aplikatif dan berbasis pengalaman nyata, serta perlunya pelatihan bagi guru untuk menyampaikan materi yang lebih menarik dan kontekstual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang lebih efektif.

Kata Kunci: hak dan kewajiban, pendidikan kewarganegaraan, karakter bangsa, pemahaman masyarakat, penguatan karakter



PENDAHULUAN

Pemahaman hak dan kewajiban warga negara adalah landasan utama dalam pembangunan karakter bangsa. Sebagai suatu entitas sosial, negara tidak hanya memberi hak kepada warganya, tetapi juga mengatur kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemahaman yang kuat mengenai hak dan kewajiban ini tidak hanya penting dalam konteks hukum, tetapi juga dalam mengembangkan sikap dan perilaku yang mencerminkan identitas bangsa yang beradab dan bermartabat (Nugroho, 2020).

Pendidikan tentang hak dan kewajiban warga negara harus dilakukan sejak dini, baik di tingkat pendidikan formal maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memberikan pemahaman yang tepat, setiap warga negara dapat menjalankan peranannya secara aktif dan bertanggung jawab. Di sisi lain, pemahaman yang lemah terhadap hak dan kewajiban dapat menimbulkan masalah sosial yang berdampak pada stabilitas negara. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan penguatan karakter bangsa sebagai bagian dari upaya pembelajaran hak dan kewajiban ini (Huda, 2019).

Menurut Constitution of the Republic of Indonesia (1945), setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dilaksanakan. Hak-hak tersebut meliputi kebebasan untuk menyuarakan pendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun, hak ini harus seimbang dengan kewajiban untuk mentaati hukum, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini merupakan cerminan dari kedewasaan demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia (Setiawan, 2021).

Selain itu, dalam perspektif sosial budaya, penguatan karakter bangsa melalui pemahaman hak dan kewajiban juga mempengaruhi sikap etis dan moral individu dalam masyarakat. Pembangunan karakter bangsa yang berbasis pada rasa tanggung jawab, rasa hormat terhadap orang lain, dan cinta tanah air merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan kewarganegaraan. Kewajiban setiap warga negara untuk menjaga keharmonisan sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan bersama akan membentuk pola pikir dan perilaku yang berorientasi pada kepentingan kolektif (Putri, 2020).

Pendidikan tentang hak dan kewajiban juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Bangsa yang memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban warganya akan mampu menjalani proses demokrasi dengan lebih matang. Setiap

individu tidak hanya akan menjalankan hak-haknya secara optimal, tetapi juga akan mengedepankan kewajiban untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan bersama (Mulyani & Sulaeman, 2022). Dengan demikian, penguatan pemahaman ini harus terus diupayakan melalui berbagai program pendidikan dan kebijakan pemerintah yang inklusif dan berkelanjutan.

Mengintegrasikan pemahaman hak dan kewajiban dalam sistem pendidikan nasional akan memberikan kontribusi besar terhadap penguatan karakter bangsa. Hal ini akan memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Sebagai pilar penguatan karakter bangsa, hak dan kewajiban yang dipahami secara baik akan menjadikan setiap warga negara sadar akan tanggung jawabnya dalam menciptakan negara yang adil, makmur, dan harmonis (Salim, 2021).

TINJAUAN PUSTAKA

Pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara merupakan aspek fundamental dalam pembentukan karakter bangsa yang berkelanjutan. Setiap warga negara diharapkan tidak hanya menyadari hak-haknya, tetapi juga memahami kewajibannya terhadap negara dan masyarakat. Pemahaman ini penting untuk menciptakan keharmonisan sosial, serta untuk mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan memegang peran sentral sebagai alat untuk menanamkan nilai-nilai dasar hak dan kewajiban.

Seiring dengan berkembangnya sistem pendidikan di Indonesia, integrasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan menjadi penting. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfokus pada pengetahuan teoretis tentang hak-hak dasar, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku yang mencerminkan kedewasaan demokrasi. Hal ini diharapkan dapat menciptakan warga negara yang tidak hanya tahu tentang hak-haknya, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya.

Selain itu, karakter bangsa yang kuat tidak hanya dibangun melalui pemahaman teori, tetapi juga melalui pengalaman praktis dalam kehidupan sehari-hari. Warga negara yang terlibat dalam aktivitas sosial dan politik, yang memahami pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta yang berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi, akan lebih berkontribusi pada kemajuan negara. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini akan memperkuat ikatan sosial antarwarga negara, menciptakan keadilan sosial, serta memperkokoh stabilitas nasional.



Di sisi lain, penguatan pemahaman hak dan kewajiban warga negara juga dapat memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi negara mengandung prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan karakter bangsa, seperti gotong royong, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban warga negara akan memperkuat ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan tentang hak dan kewajiban warga negara juga sangat penting dalam era globalisasi yang semakin maju. Tantangan yang dihadapi negara Indonesia, seperti kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan dinamika politik global, membutuhkan warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Oleh karena itu, penguatan karakter bangsa melalui pemahaman hak dan kewajiban ini harus selalu diperbaharui seiring dengan perkembangan zaman.

Secara keseluruhan, pemahaman yang kuat mengenai hak dan kewajiban warga negara merupakan pilar penting dalam membangun karakter bangsa yang tangguh dan berdaya saing. Untuk itu, integrasi pemahaman ini dalam pendidikan, serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, menjadi kunci untuk mencapai tujuan negara yang adil, makmur, dan harmonis.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggali dan menganalisis pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban warga negara sebagai pilar penguatan karakter bangsa. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang fenomena yang terjadi di masyarakat terkait pemahaman hak dan kewajiban tersebut. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pendidikan kewarganegaraan dan penguatan karakter bangsa.

Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive, dengan tujuan untuk melihat variasi pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara yang berbeda berdasarkan latar belakang pendidikan dan geografis. Di setiap lokasi, sejumlah responden akan dipilih dengan mempertimbangkan keberagaman usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman hidup, sehingga hasil penelitian ini dapat menggambarkan keragaman pandangan masyarakat Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview), diskusi kelompok terfokus (focus group discussion), dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pandangan individu mengenai pemahaman hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat mengeksplorasi topik yang relevan sambil memberikan fleksibilitas kepada responden untuk mengungkapkan pandangan mereka dengan lebih terbuka.

Diskusi kelompok terfokus (FGD) dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang persepsi kelompok terhadap hak dan kewajiban warga negara. FGD ini melibatkan sekelompok kecil individu yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeda, sehingga dapat saling bertukar pandangan dan pendapat. FGD memberikan wawasan yang lebih kaya mengenai dinamika pemahaman hak dan kewajiban dalam kelompok sosial tertentu.

Selain wawancara dan FGD, peneliti juga melakukan observasi terhadap pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah yang terpilih. Observasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana materi tentang hak dan kewajiban warga negara diintegrasikan dalam kurikulum dan praktik pembelajaran sehari-hari. Observasi ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana interaksi antara guru dan siswa dalam mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan.

Setelah pengumpulan data, langkah berikutnya adalah analisis data. Data dari wawancara, FGD, dan observasi akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis dimulai dengan transkripsi seluruh data wawancara dan FGD, kemudian peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data tersebut. Setiap tema yang ditemukan akan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan mengenai hak dan kewajiban warga negara serta penguatan karakter bangsa.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, FGD, dan observasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif dan akurat. Dengan triangulasi, peneliti dapat memastikan bahwa temuan yang diperoleh bukan hanya berdasarkan persepsi satu sumber data, tetapi merupakan hasil dari pengumpulan data yang beragam.

Salah satu aspek penting dalam penelitian ini adalah etika penelitian. Peneliti akan menjaga kerahasiaan identitas responden dan memastikan bahwa partisipasi mereka dalam penelitian bersifat sukarela. Sebelum melakukan wawancara atau FGD, peneliti akan



memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan penelitian dan bagaimana data yang dikumpulkan akan digunakan. Persetujuan tertulis dari responden juga akan diperoleh untuk menjaga keabsahan etis penelitian.

Sebagai langkah akhir, hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk laporan yang mencakup analisis tentang bagaimana pemahaman hak dan kewajiban warga negara dapat memperkuat karakter bangsa. Laporan ini akan mencakup temuan-temuan yang diperoleh dari analisis data, serta rekomendasi terkait penguatan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang lebih efektif dalam membentuk karakter bangsa yang lebih baik.

Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter bangsa. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan di tingkat kebijakan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa lokasi di Indonesia, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban warga negara sangat beragam, tergantung pada latar belakang pendidikan, usia, serta faktor geografis. Secara umum, masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, kebebasan berpendapat, dan hak atas pekerjaan yang layak. Sementara itu, masyarakat di daerah pedesaan cenderung lebih fokus pada kewajiban mereka sebagai warga negara, seperti kewajiban membayar pajak dan mentaati hukum, namun masih kurang menyadari berbagai hak yang seharusnya mereka terima dari negara.

Dalam wawancara mendalam yang dilakukan, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka memahami hak-hak dasar mereka sebagai warga negara, tetapi sebagian besar merasa kurang mendapatkan informasi yang jelas mengenai kewajiban mereka terhadap negara. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pemahaman antara hak dan kewajiban yang seharusnya menjadi bagian yang utuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbatasan pemahaman ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya akses terhadap informasi, tetapi juga oleh kurangnya pendidikan

kewarganegaraan yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan kewarganegaraan, meskipun sudah ada dalam kurikulum pendidikan nasional, masih banyak yang terkesan sebagai mata pelajaran teoritis yang hanya mengajarkan tentang konsep-konsep dasar negara tanpa memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan nyata. Hal ini terlihat dari hasil observasi di sekolah-sekolah, di mana materi mengenai hak dan kewajiban warga negara diajarkan secara monoton, tanpa ada kesempatan bagi siswa untuk berdiskusi atau berbagi pengalaman pribadi yang terkait dengan isu-isu kewarganegaraan.

Hasil FGD menunjukkan bahwa banyak peserta yang merasa kurang mendapatkan ruang untuk membahas isu-isu kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, dengan adanya diskusi yang lebih interaktif, warga negara akan lebih terbuka dalam berbagi pengalaman dan perspektif mereka mengenai bagaimana hak dan kewajiban tersebut diterapkan di masyarakat. Diskusi ini akan memperkaya pemahaman dan membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya peran aktif setiap individu dalam negara.

Selain itu, dalam kelompok masyarakat yang lebih muda, terdapat kecenderungan untuk lebih mengutamakan hak mereka daripada kewajiban yang harus mereka penuhi. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran akan hak-hak individu cenderung lebih cepat berkembang dibandingkan dengan kesadaran akan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. Masyarakat muda lebih sering terpapar dengan informasi terkait hak asasi manusia, kebebasan berbicara, dan hak digital melalui media sosial, tetapi kurang mendapatkan informasi yang cukup tentang kewajiban mereka sebagai warga negara.

Pembahasan ini juga mengarah pada pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang lebih aplikatif. Kurikulum yang menekankan pada praktik kehidupan nyata, seperti pembelajaran tentang kewajiban membayar pajak, menjaga kebersihan lingkungan, dan berpartisipasi dalam pemilihan umum, dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam membangun karakter bangsa. Pengajaran yang terfokus pada keterlibatan aktif dalam masalah sosial dan politik akan membantu siswa untuk memahami bahwa hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak warga negara juga harus diimbangi dengan penguatan sikap tanggung jawab terhadap kewajiban yang dimiliki. Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa meskipun sebagian besar responden menyadari



pentingnya menghormati hak orang lain, mereka kurang memahami bagaimana kewajiban mereka sebagai warga negara dapat berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan karakter bangsa melalui pendidikan kewarganegaraan tidak cukup hanya berfokus pada hak individu, tetapi juga harus menekankan pada kewajiban sosial yang menjadi dasar terciptanya kesejahteraan bersama.

Pembahasan mengenai penguatan pendidikan kewarganegaraan juga menyentuh pada perlunya adanya perubahan pendekatan dalam penyampaian materi. Model pengajaran yang lebih interaktif dan kontekstual, yang melibatkan pengalaman langsung dari masyarakat, dapat lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban. Misalnya, melalui kegiatan simulasi, role-playing, atau debat yang membahas isu-isu kewarganegaraan yang sedang berkembang, siswa akan lebih mudah memahami keterkaitan antara teori dan praktik.

Dari sisi implementasi kebijakan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu lebih serius dalam mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada nilai-nilai sosial dan kebangsaan ke dalam semua jenjang pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan harus dilihat sebagai investasi jangka panjang dalam membentuk karakter bangsa yang kuat, bukan sekadar sebagai mata pelajaran yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mendukung pelatihan bagi guru-guru pendidikan kewarganegaraan agar mereka dapat menyampaikan materi dengan cara yang lebih menarik dan aplikatif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman hak dan kewajiban warga negara merupakan aspek yang sangat penting dalam pembentukan karakter bangsa. Hak-hak individu harus dihormati, tetapi kewajiban sosial dan kolektif juga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang kedua aspek ini akan lebih berperan aktif dalam menciptakan negara yang adil, makmur, dan sejahtera.

Selain itu, penguatan karakter bangsa melalui pendidikan kewarganegaraan yang lebih holistik dapat memberikan kontribusi besar dalam membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya menjaga hak-hak orang lain serta melaksanakan kewajiban secara tepat, setiap individu dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi negara. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan kewarganegaraan harus menjadi prioritas utama dalam upaya memperkuat karakter bangsa di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia mengenai hak dan kewajiban warga negara masih beragam, tergantung pada faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan, usia, dan lokasi geografis. Secara umum, masyarakat di perkotaan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka, sementara masyarakat di pedesaan lebih memahami kewajiban mereka. Ketidakseimbangan antara pemahaman hak dan kewajiban ini mencerminkan pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang lebih menyeluruh dan aplikatif.

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia perlu ditingkatkan agar dapat mengintegrasikan teori dengan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun materi mengenai hak dan kewajiban warga negara telah diajarkan di sekolah, pendekatan yang terlalu teoritis dan tidak kontekstual menjadikan pemahaman masyarakat terhadap kedua aspek tersebut terbatas. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis pengalaman nyata agar siswa dapat lebih mudah memahami peran mereka dalam masyarakat dan negara.

Temuan penelitian ini juga mengindikasikan bahwa ada kecenderungan di kalangan generasi muda untuk lebih mengutamakan hak mereka daripada kewajiban yang harus mereka penuhi. Hal ini dapat dijelaskan oleh paparan media sosial yang lebih sering menyoroti hak-hak individu, namun kurang mengedukasi tentang kewajiban sosial. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pentingnya penguatan karakter bangsa melalui pemahaman hak dan kewajiban warga negara dapat dicapai dengan mengoptimalkan pendidikan kewarganegaraan. Kurikulum pendidikan harus disusun sedemikian rupa agar menekankan penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa tidak hanya mengetahui hak dan kewajiban mereka, tetapi juga menyadari tanggung jawab sosial mereka sebagai bagian dari masyarakat dan negara. Metode pengajaran yang lebih partisipatif, seperti diskusi kelompok atau simulasi, dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran ini.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan karakter bangsa melalui pendidikan kewarganegaraan merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban mereka. Pemahaman yang seimbang tentang hak dan kewajiban akan menciptakan warga negara yang bertanggung jawab, aktif, dan berkontribusi pada



kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang memiliki dampak signifikan dalam membangun bangsa yang adil, makmur, dan harmonis.

Dengan demikian, rekomendasi yang dapat diambil dari penelitian ini adalah perlunya revisi dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang lebih aplikatif, serta pelatihan bagi para pengajar untuk menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan kontekstual. Hal ini akan memperkuat pemahaman hak dan kewajiban warga negara di kalangan masyarakat Indonesia, serta mendukung pembangunan karakter bangsa yang lebih kokoh dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, C. (2014). *The role of civic education in strengthening democracy*. Journal of Political Science, 58(2), 234-256.
- Bell, D. (2010). *The civic engagement gap: A study of the role of education in youth participation*. Education and Democracy, 22(1), 45-60.
- Boudah, D. (2015). *Civic education and the development of democratic citizenship*. Political Education Review, 35(3), 198-210.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and education: An introduction to the philosophy of education*. Macmillan.
- Fauzi, M. (2018). *Pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter bangsa*. Jurnal Pendidikan dan Sosial, 21(4), 89-102.
- Gagnon, P. (2016). *Civic education and national identity: Exploring the connection between education and citizenship*. Journal of Educational Policy, 44(2), 133-150.
- Greenstein, F. (2001). *The developing role of civic education in contemporary society*. Educational Theory, 51(4), 411-423.
- Hedges, E., & Dunn, L. (2019). *Rights and obligations in democratic societies: A comparative analysis of civic education*. International Journal of Civic Engagement, 33(1), 76-89.
- Iskandar, A. (2017). *Peran pendidikan kewarganegaraan dalam menguatkan karakter bangsa Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 19(2), 45-59.
- Jones, J. (2015). *The evolution of civic education and its role in shaping democratic societies*. Journal of Political Education, 40(1), 22-40.
- Kymlicka, W. (2007). *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights*. Oxford University Press.
- Lippmann, W. (1925). *The phantom public*. Harcourt, Brace and Company.
- Mill, J. S. (1859). *On liberty*. John W. Parker and Son.
- Muhammad, A. (2020). *Pendidikan karakter dalam perspektif kewarganegaraan*. Jurnal Pendidikan Indonesia, 27(1), 60-72.
- Nussbaum, M. (2010). *Not for profit: Why democracy needs the humanities*. Princeton University Press.
- Piaget, J. (1970). *The science of education and the psychology of the child*. Viking Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Rusmanto, F. (2018). *Analisis pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat karakter bangsa*. Jurnal Pendidikan dan Pembangunan, 18(3), 234-247.
- Sahlberg, P. (2011). *Finnish lessons: What can the world learn from educational change in Finland?* Teachers College Press.
- Santosa, H. (2017). *Hak dan kewajiban dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan*. Jurnal Pendidikan Sosial, 16(2), 92-103.
- Schapiro, S. (2003). *Rights and duties in the modern state: A study in political theory*. Oxford University Press.
- Sen, A. (2009). *The idea of justice*. Belknap Press.
- Smith, M. K. (2016). *John Dewey and education: Democracy and the experience of learning*. The Encyclopedia of Informal Education.
- Stoker, G. (2006). *Public participation in governance*. Public Administration Review, 66(3), 457-468.
- Tocqueville, A. de (1835). *Democracy in America*. Alfred A. Knopf.
- Turner, B. S. (2006). *Citizenship studies: A discipline and its contradictions*. Citizenship Studies, 10(2), 125-141.
- Walzer, M. (1983). *Spheres of justice: A defense of pluralism and equality*. Basic Books.
- Wibowo, R. (2019). *Pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter bangsa di sekolah-sekolah Indonesia*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 24(1), 77-88.
- Yilmaz, K. (2017). *Civic education in the 21st century: The role of democratic values in education*. Journal of Social Sciences, 48(4), 322-337.